

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PELAYANAN KEBERSIHAN
DI KOTA TANJUNG BALAI KARIMUN
TAHUN 2011 - 2013**

Oleh:

Mohamad Rihandra Adiarta
Rihandraadiarta@ymail.com
Pembimbing : Drs. Erman M, M.Si

Abstract

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761 – 63277

Until now, the problem of garbage in Tanjung Balai Karimun still not resolved optimally. This study aims to determine how the role of Local Government in the creation and establishment of local regulations on hygiene services in Karimun. This study used a qualitative method and conducted in Tanjung Balai Karimun.

This study uses informants as sources of information objects that aims to achieve mastery in getting information. Data used in this study are primary data and secondary data obtained through direct observation and interviews with informants. Analysis of the data in a descriptive study conducted by describing the data in a systematic and objective so as to produce factual information, current, and accurate.

Based on the results of the study found that in general the role of the Department of Health and Landscaping in terms of addressing the waste problem is in accordance with the applicable rules and regulations. However, there are several causes not optimal policy for the purpose of cleanliness and beauty of this city is due to the level of public awareness and legal compliance to environmental hygiene is still low. Although there dissemination of hygiene control and beauty of the city conducted by the Regional Government of Karimun but people are less aware of the importance of cleanliness and beauty of the surroundings. The absence of strict enforcement by the authorities in terms of waste disposal.

Keyword: Policies, Health, Tanjung Balai Karimun

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena merupakan faktor utama terciptanya pembangunan daerah yang tertata dengan baik. Permasalahan sampah ini adalah permasalahan yang sangat umum dihadapi oleh setiap daerah maupun kota, tidak berbeda dengan Kota Tanjung Balai Karimun yang belum mampu untuk mengatasi permasalahan ini secara tuntas. Permasalahan ini menjadi sangat urgent untuk segera diselesaikan karena apabila dibiarkan tentunya akan semakin berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang harus diatasi oleh pemerintah setempat yang menjadi aktor utama penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam hal melayani dan merespon aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Tanjung Balai Karimun adalah ibukota Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Yang terdiri dari 12 Kecamatan dengan jumlah penduduk 282.475 jiwa.

Menurut Perda Kabupaten Karimun No 02 Tahun 2005 Tentang pengelolaan Pertamanan dan Kebersihan, kebersihan adalah salah satu kehidupan yang didambakan oleh manusia dan perlu dipelihara keberadaannya dan terdapat pada alam dan sekitar kita, sampah adalah benda - benda yang tidak berguna dan atau telah yang di buang oleh pemakainya yang di anggap mengganggu oleh lingkungan. Dengan demikian Pemerintah Daerah ditantang untuk

meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Di dalam pengelolaan kebersihan di Kota Tanjung Balai Karimun Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan menangani kebersihan di Kota Tanjung Balai Karimun.

Belum dapat dikelolanya dengan baik limbah dan sampah sebagai hasil sisa hasil produksi, dari kegiatan industri, limbah medis dan lainnya serta belum berperannya teknologi dalam pengelolaan sampah domestik baik sampah rumah tangga, pasar dan industri menambah semakin kompleksnya penanganan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Balai Karimun. Selain itu, hampir disemua kecamatan belum melakukan pengelolaan limbah domestik baik sampah maupun air limbah domestik.

Dari data yang diperoleh dari dinas kebersihan Kabupaten Karimun dapat dilihat masih banyak sampah yang belum dapat diatasi sebagai salah satu wujud pelayanan Pemerintah kepada masyarakat. Hal ini dapat disebabkan karena masih belum maksimalnya Pemerintah Daerah dalam mengelola dan memfasilitasi pelayanan kebersihan di Kota Tanjung Balai Karimun. Selain itu, jumlah sarana dan prasarana kebersihan juga mempengaruhi permasalahan ini, karna jumlah sarana dan prasarana yang tidak memadai tentu berimplikasi pada optimalisasi pengelolaan dan penanganan permasalahan sampah ini.

No.	Sarana Dan Prasarana	Jumlah (Unit)
1.	Amroll	2
2.	Dumtruck	5
3.	Pick Up	1
4.	Kendaraan Roda Tiga	3
5.	Container	6

Tabel. 1
SARANA DAN PRASARANA DI TANJUNG BALAI KARIMUN

Sumber : Dinas Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun 2013

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa jumlah sarana dan prasarana yang terdapat di Kota Tanjung Balai Karimun masih terlalu sedikit untuk melayani masyarakat dalam hal pelayanan kebersihan.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari kurangnya sarana dan prasarana ini tentunya sangat mempengaruhi kebersihan di Kabupaten Karimun. Untuk itu maka menarik kiranya untuk dilakukan penelitian dengan Judul **“Kebijakan Pemerintah Tentang Pelayanan Kebersihan di Kota Tanjung balai Karimun Tahun 2011-2013”**.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang dijelaskan di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu: “Apa saja upaya-upaya yang

dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun dalam meningkatkan pelayanan kebersihan di Kota Tanjung Balai Karimun?”

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif.

Penelitian ini dilakukan dengan analisa kualitatif, jenis penelitian ini dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti Suyanto (2010:166).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang Kebijakan Pemerintah tentang Pelayanan Kebersihan dilakukan di Kota Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan dan pihak-pihak yang

berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, adapun data tersebut menyangkut tentang permasalahan kriteria tentang permasalahan “ KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PELAYANAN KEBERSIHAN DI KOTA TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2011-2013”.

b. Data Sekunder

Untuk data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk jadi seperti :

- 1) Dokumen tertulis tentang jumlah produksi sampah pertahun.
- 2) Jumlah sarana dan prasarana, dan jumlah sampah yang ditangani setiap tahunnya.
- 3) Data – data terkait lainnya untuk menunjang informasi dalam penulisan skripsi ini seperti jurnal, artikel dan media massa.

Data sekunder ini antara lain didapatkan pada Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun.

4. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka perlu untuk melakukan pendekatan dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada aktor atau orang yang mengetahui tentang permasalahan – permasalahan yang akan diteliti seperti penelitian penjelasan tentang upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan sampah ini dan bagaimana opini masyarakat mengenai hal ini. Maka perlu untuk menentukan informan

terlebih dahulu. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah :

Tabel. 2
Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Faizal Taufik	Kepala Dinas Kebersihan
2.	DR. Amjon, Mpd	Kepala Badan Lingkungan Hidup
3.	Sapto	Operator Kebersihan
4.	Anwar	Masyarakat Tg Balai Karimun
5.	Ir. Abu	Kepala Bidang Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum

Sumber: Data Olean Penulis Tahun 2015

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data dengan memperhatikan tahap – tahap yang terdiri dari :

1. Menetapkan kepada siapa wawancara dan pertanyaan itu dilakukan
2. Menyiapkan masalah – masalah pokok yang menjadi bahan pembicaraan.
3. Mengawali sambil membuka alur wawancara
4. Mengkonfirmasi ikhtisar wawancara dan mengakhirinya.

b. Dokumentasi

Yaitu penelitian melakukan penelitian pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Telah kepustakaan dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dengan konsep dan teori yang berkaitan secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. UPAYA PEMERINTAH DALAM PELAYANAN KEBERSIHAN DI KOTA TANJUNG BALAI KARIMUN

Kebersihan merupakan masalah perkotaan hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Di Kota Tanjung Balai Karimun persoalannya lebih kompleks dikarenakan tidak ada intervensi dari pengambil kebijakan saat ini. Hal ini menyebabkan Kota Tanjung Balai Karimun semakin tampak lebih kotor. Sampah-sampah yang tidak terangkut akan menimbulkan tumpukan – tumpukan sampah terutama dilingkungan kota dan wilayah pemukiman warga.

Dalam penganalisisan masalah ini diketahui bahwa Tanjung Balai Karimun lebih menitik beratkan masalah kebersihan pada sampah. Menurut Perda Kabupaten Karimun No 02 Tahun 2005 Tentang pengelolaan Pertamanan dan Kebersihan, kebersihan adalah salah satu kehidupan yang didambakan oleh manusia dan perlu dipelihara keberadaannya dan terdapat pada alam dan sekitar kita, sampah adalah benda - benda yang tidak berguna dan atau telah yang di buang oleh pemakainya yang di anggap mengganggu oleh lingkungan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun. Kota Tanjung balai Karimun memproduksi 11,790 M sampah per bulan, Dari data di Dinas Kebersihan menyebutkan sekitar 7660 M sampah yang terlayani setiap bulan, sedangkan sisanya 4130 M sampah pertahun yang tidak terangkut dan sebagian di buang ke sungai, parit, dan sebagian lainnya dibakar.

Dari data diatas dapat dilihat masih banyak sampah yang belum dapat diatasi sebagai salah satu wujud pelayanan Pemerintah kepada masyarakat. Hal ini dapat disebabkan karena masih belum maksimalnya Pemerintah Daerah dalam mengelola dan memfasilitasi pelayanan kebersihan di Kota Tanjung Balai Karimun. Selain itu, jumlah sarana dan prasarana kebersihan juga mempengaruhi permasalahan ini, karna jumlah sarana dan prasarana yang tidak memadai tentu berimplikasi pada optimalisasi pengelolaan dan penanganan permasalahan sampah ini.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa lingkungan merupakan hal yang terpenting dalam perjalanan kebersihan, dikarenakan lingkungan merupakan sumber kehidupan makhluk hidup. Sehingga lingkungan yang identik dengan bersih membuat masyarakat/makhluk hidup nyaman tinggal berada di daerah itu. Lingkungan kota Tanjung balai Karimun yang dikatakan sebagai genangan sampah pada tahun 2013 memberikan permasalahan yang begitu signifikan bahwa lingkungan kota ini bukan lingkungan yang indah dan

bersih , segala fakta yang ada hanya membuat segalanya berangan-angan untuk mendambakan lingkungan yang indah, segar dan nyaman. Sedangkan perubahan yang awalnya di agung-agungkan oleh individu pun berakhir menjadi penyesalan yang hanya berasa dikala itu tanpa menyadari bahwa segala yang ada dalam lingkungan baik itu air , tanah, udara dan lain-lain itu teramat penting.

Dapat dikatakan bahwa kebersihan akan mempengaruhi jalannya sektor yang lain. Seperti kesehatan, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Sebagai sebuah satu kesatuan, setiap sektor kehidupan dan penghidupan masyarakat saling mempengaruhi. Artinya jika terjadi masalah pada satu sektor, maka akan mempengaruhi yang lainnya. Karena itu analisis sebagai sesuatu yang dilaksanakan untuk memberikan pencegahan maupun alternatif permasalahan pada berbagai sektor, terutama kebersihan suatu daerah.

Apapun upaya yang tersedia untuk melakukan pengelolaan sampah, pastikan satu hal pemilahan sampah berjalan baik, karena pemilahan menjadi syarat utama semua teknologi pengolahan sampah. Tantangan pengomposan adalah nilai ekonomi yang kurang menjanjikan, hal ini bisa mengurangi antusias masyarakat. Pemahaman dan pendekatan pada masyarakat harus disertai perubahan cara pandang masyarakat terhadap sasaran hasil kompos tersebut. Sementara teknologi yang ada bisa di kondisikan di masyarakat.

Tantangan dalam pengelolaan sampah oleh masyarakat di Kota

Tanjung Balai Karimun adalah bagaimana menumbuh kembangkan partisipasi aktif masyarakat itu sendiri yaitu dengan membiasakan merubah tradisi masyarakat selama ini, maupun membangun paradigma bahwa sampah memiliki potensi lebih dan memberikan keterampilan adalah agenda-agenda yang harus dibangun. Adapun upaya pemerintah dalam pelayanan kebersihan sebagaimana yang juga tercatat dalam Laporan Akhir Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan SDM petugas kebersihan dengan melakukan *team bulding* agar lebih menguasai tugas yang harus dilaksanakan di lapangan.
- 2) Penambahan tenaga kerja *out sourcing* yang dikelola sendiri oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Karimun.
- 3) Armada dan alat berat pengangkutan sampah diperbaiki dan mengajukan ke Pemerintah untuk penggantian armada sehingga pengendalian kebersihan dan keindahan kota dapat terkendali apabila armada dalam keadaan baik.
- 4) Pembersihan dan penebangan pohon lindung di sekitar jalan raya dengan teratur agar dapat terkendali ketika hujan, memperbaiki sarana dan prasarana untuk menjaga kontinuitas dekorasi taman kota dengan pemupukan dan penyiraman.
- 5) Mengadakan pengawasan yang insentif dalam pemungutan

retribusi sampah untuk mengoptimalkan retribusi khususnya toko dan tempat usaha.

- 6) Mengadakan sosialisasi pada masyarakat agar ikut berpartisipasi menjaga kebersihan dan keindahan kota dengan agenda di setiap kelurahan wilayah Kota Tanjung balai Karimun yang dihadiri perwakilan tokoh masyarakat setempat untuk menghimbau ke RT dan RW.
- 7) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan instansi lain seperti Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun, Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun dalam meningkatkan kebersihan dan keindahan kota.

Minimalisasi limbah/sampah adalah upaya untuk mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas, dan tingkat bahaya limbah yang berasal dari proses produksi dengan reduksi dari sumber dan pemanfaatan limbah. Pada dasarnya minimisasi limbah/sampah merupakan bagian dari pengelolaan limbah dan dapat mengurangi penyebaran limbah di lingkungan, meningkatkan efisiensi produksi dan dapat memberikan keuntungan ekonomi, antara lain:

- 1) Mengurangi biaya pengangkutan ke pembuangan akhir
- 2) Mengurangi biaya pembuangan akhir

- 3) Meningkatkan pendapatan karena penjualan dan pemanfaatan limbah.

Usaha minimisasi limbah di Indonesia telah dimulai di sektor industri pada tahun 1995 dengan membuat suatu komitmen nasional dalam penerapan strategi produksi bersih dalam proses industri. Walaupun demikian usaha serupa belum dimulai di sektor domestik/rumah tangga dan baru terbatas pada kegiatan pengumpulan dan sedikit daur-ulang. Salah satu bagian dari minimisasi limbah yang perlu diperhatikan adalah limbah atau sampah padat yang dihasilkan dari pengemasan (*packing*) karena jumlah yang dihasilkan akan semakin meningkat di masa mendatang. Upaya minimisasi limbah padat rumah tangga antara lain melalui kegiatan daur-ulang dan produksi kompos. Sangat disayangkan bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki komitmen yang kuat mengenai minimisasi limbah rumah tangga.

Isu strategis yang teridentifikasi dalam pengelolaan sub-sektor Persampahan di Kota Tanjung balai terdiri dari isu teknis operasional maupun non teknis. Masalah teknis operasional berkaitan dengan layanan pengelolaan persampahan dan ketersediaan sarana prasarannya, sedangkan isu non teknis adalah masalah operasional yang muncul yang terkait dengan dukungan aspek-aspek lain dalam pengelolaan persampahan.

1. Peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun

Untuk mencapai peningkatan kenyamanan dan ketentraman maka pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karimun Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kebersihan. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, permasalahan kebersihan di Kota Tanjung Balai Karimun dengan jelas sudah dilimpahkan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun sebagai salah satu aktor yang bertanggung jawab mengatasi permasalahan ini. Peran serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan sangat mempengaruhi dalam penyelesaian permasalahan sampah ini.

Bidang kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun dalam mengimplementasikan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan jalan-jalan umum dan tempat-tempat umum berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota. Kegiatan administrasi tersebut seperti yang tercantum dalam laporan akhir tahun Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kabupaten Karimun Tahun 2012 diantaranya:

- a. Penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan teknis operasional kebersihan jalan-jalan raya, taman-taman kota, lapangan terbuka, saluran dan trotoar.
- b. Penyelenggaraan pembersihan sampah di jalan-jalan raya, tamantaman kota, lapangan terbuka dan trotoar.
- c. Membersihkan rumput dan kotoran lainnya yang berada di jalan raya, trotoar dan fasilitas umum.
- d. Mengangkut sampah dan kotoran lainnya yang berada di jalan, trotoar, fasilitas umum dan tepi / bantaran saluran air / sungai ke TPS dan TPA.
- e. Melaporkan kepada pengendali apabila ada sampah dalam jumlah besar untuk diangkut.
- f. Melaporkan kerusakan peralatan kerja kepada pengendali.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pengendali.

Petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjung Balai Karimun sudah melakukan penertiban pada aspek kebersihan jalan-jalan umum dan tempat - tempat umum namun masih tetap ada pelanggaran karena kurangnya pengawasan. Dinas tersebut juga telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan langsung di lapangan tapi mekanisme pembuangan yang dilakukan masyarakat belum memenuhi prosedur yang telah ditetapkan pada peraturan daerah yang mencakup hukum positif mengenai

pengendalian kebersihan dan keindahan kota.

Pelanggaran ini dikarenakan perilaku masyarakat yang melanggar aturan sebagai penanggung jawab kebersihan dan keindahan jalan-jalan umum dan tempat - tempat umum kurang ikut berpartisipasi pada implementasi kebijakan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan kota.

Selain itu, Tempat Pembuangan Akhir yang merupakan sarana fisik untuk kegiatan pembuangan sampah, TPA harus dilengkapi dengan kolam pengolahan air limbah dan hasil proses derkomposisi sampah organik yang biasanya akan keluar dan area penimbunan pada waktu musim hujan, apabila pengelolaan sampah ini tidak ditangani dengan baik maka akan menimbulkan pencemaran lingkungan dan permasalahan pencemaran air tanah, air permukaan yang berkepanjangan.

Berdasarkan hasil wawancara di dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tentang kebersihan di Kota Tanjung balai Karimun sudah dilaksanakan untuk setiap indikatornya dengan baik. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka Bidang kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Karimun dalam kebijakan pelayanan kebersihan dan keindahan jalan-jalan umum dan tempat-tempat umum berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota.

2. Peran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun

Fungsi Dinas pekerjaan umum dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas antara lain :

- a. Penyusunan perencanaan di bidang cipta karya, sumber daya air, bina marga, tata kota dan kebersihan.
- b. bidang cipta karya, sumber daya air, bina marga, tata kota dan kebersihan.
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang cipta karya sumber daya air, bina marga, tata kota dan kebersihan.
- d. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas.
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dilihat dari salah satu fungsi Dinas Pekerjaan Umum yang tercantum dan dijelaskan diatas secara jelas memiliki pengaruh terhadap perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan dalam meningkatkan kebersihan dan pelestarian lingkungan.

Dari penjelasan dalam wawancara dapat disimpulkan bahwa setiap perangkat daerah secara umum hanya menjalankan tugas dan fungsi yang telah diembankan dan menjadi tanggung jawab mereka masing – masing. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dalam hal mengatasi permasalahan sampah di Kota Tanjung balai ini hanya sebagai

innovator khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana yang digunakan oleh masyarakat maupun petugas kebersihan itu sendiri.

3. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat adalah salah satu komponen lingkungan hidup, yang memiliki ciri yang sangat berbeda dengan komponen-komponen lingkungan lainnya. Dengan berbagai tingkah laku, corak kepentingan, keinginan, ideology, pandangan nilai dan seterusnya maka manusia telah banyak mempengaruhi dan mengubah wajah bumi ini dan cenderung tidak lagi mencerminkan ketidakseimbangan.

Dalam lingkungan hidup yang baik, interaksi antara berbagai komponen akan selalu terdapat keseimbangan. Keseimbangan demikian boleh disebut tergantung pada kepentingan manusia, karena pada hakekatnya lingkungan hidup adalah bersifat *antrophocentris*. Artinya lingkungan hidup dipelihara, dibangun atau dikelola dengan sebaik-baiknya tidak lain demi kepentingan dan kelangsungan kehidupan generasi-generasi umat manusia.

Kesadaran individu begitu penting untuk menjalankan perubahan kebersihan pada lingkungan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Namun mayoritas para masyarakat masih baru berantusias dalam signifikan yang berada di satu aspek saja.

Kebanyakan individu berfikir apatis (acuh tidak acuh) terhadap lingkungan sekitar dan hanya berfikir untuk diri sendiri (egois). Padahal

begitu banyak cara yang dapat dilakukan bila memang ada rasa kepedulian dalam membangun segalanya agar lebih baik. Dan berbagai cara telah digaungkan tetapi hanya 1 diantara 10 individu yang memiliki sifat kepedulian itu.

Di masa sekarang, tidak ada yang tidak mungkin, para ahli pun mengembangkan dan memberi inisiatif-inisiatif yang jitu dalam menjaga kebersihan, contohnya: Pendaur ulangan. Tidak heran sekarang banyak toko-toko yang menjual alat daur ulang karena kepedulian terhadap lingkungan dan apalagi dapat menghasilkan. Sebagaimana yang di jabarkan kenapa hanya sedikit individu yang berfikiran seperti itu layaknya individu yang tidak ingin terpuruk. Namun dalam hal ini semuanya akan berjalan lebih baik apabila dilakukan beberapa kegiatan yang akhirnya bisa menyadarkan masyarakat betapa pentingnya kebersihan, betapa pentingnya dampak positif jika membuang sampah sembarangan dan betapa indahnya sebuah kota apabila kota tersebut indah, bersih, nyaman dan segar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan saran atas uraian yang telah penulis sampaikan pada bab-bab terdahulu dan Hasil mencoba memberikan beberapa pemikiran yang berkaitan dengan implementasi Perda Kabupaten Karimun No 02 Tahun 2005 Tentang pengelolaan Pertamanan dan Kebersihan Tentang

Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Kota Tanjung balai Karimun.

1. Secara umum peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam hal mengatasi permasalahan sampah ini sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Namun masih terdapat beberapa penyebab belum optimalnya tujuan dari kebijakan tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan kota ini salah satunya disebabkan oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap kebersihan lingkungan yang masih rendah. Selain itu pertambahan jumlah penduduk yang selalu meningkat dan tersebar sehingga tidak terjangkanya pelayanan kebersihan secara menyeluruh. Meskipun sudah ada sosialisasi tentang pengendalian kebersihan dan keindahan kota yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Tanjung balai Karimun namun masyarakat kurang menyadari pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan. Belum adanya penegakan hukum secara tegas oleh aparat dalam hal pembuangan sampah. Elemen Pemerintah hanya dapat memberikan penyuluhan dan bimbingan yang tidak diimbangi oleh kesadaran masyarakat sehingga dalam penegakkan Peraturan Daerah ini belum terlaksana secara

efektif. Namun upaya untuk mengatasi hambatan diatas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah memiliki beberapa solusi diantaranya peningkatan SDM pegawai, memperbaiki sarana, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan bekerja sama dengan instansi pemerintah Kabupaten Karimun.

2. Hambatan yang dialami oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun dalam menyelenggarakan kebersihan dan keindahan kota salah satunya adalah kurangnya tindakan pengawasan dan penyidikan dibidang kebersihan dikarenakan sulit untuk mencari bukti. Sarana dan prasarana untuk melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah sebagian mulai tidak layak pakai karena usia yang tua sehingga menyebabkan mekanisme pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal. Belum adanya pengolahan sampah yang berskala lingkungan dengan menggunakan sistem 3R (*Reuse, Reduce* dan *Recycle*). Selain itu keterbatasan anggaran dan tempat pemrosesan (TPA) sampah sememal masih menggunakan sistem *open dumping* dan telah mengalami *over volume*.

B. Saran

1. Seharusnya Pemerintah Daerah melakukan penyuluhan-

penyuluhan dan sosialisasi secara berkelanjutan tentang masalah kebersihan dan keindahan kota beserta peraturan perundang-undangan kepada masyarakat khususnya permasalahan penataan dan pemanfaatan ruang serta persampahan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka akan pentingnya pengendalian lingkungan hidup bagi masyarakat itu sendiri dan bagi citra kota yang bersih, rapi, indah dan nyaman serta meningkatkan kepatuhan mereka terhadap ketentuan-ketentuan manajemen pengelolaan sampah yang ada beserta sanksi-sanksi hukumnya melalui media cetak, elektro, spanduk dan papan himbauan.

2. Melakukan perbaikan sarana dan prasarana agar implementasi Peraturan Daerah tersebut dari aspek kelembagaan dan infrastruktur dapat berjalan secara optimal.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun segera mengoptimalkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar sanksi dan penegakkan hukum bagi pelanggaran khususnya pembuangan sampah dengan volume besar dari toko atau tempat usaha.
4. Peningkatan efektifitas penegakkan hukum terhadap pelanggaran regulasi di bidang penataan dan pemanfaatan

ruang terbuka hijau kebersihan dan keindahan kota Dan menerapkan sanksi pidana sesuai dengan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 02 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan.

5. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi toko atau tempat usaha untuk patuh membayar retribusi kebersihan serta berperan aktif sesuai peraturan perundang-undangan kebersihan dan keindahan kota yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Anderson, James E, 1994. *Public Policy Making – An Introduction (secondedition)*, Texas A & M University.
- Adisumarto, Harsono. 1987, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo :Jakarta.
- Arief, Muhtosin. 2006 *Pemasaran Jasa dan Kualitas Pelayanan: Bagaimana mengelola kualitas pelayanan agar memuaskan pelanggan*, Gramedia : Jakarta.
- Bagong, Suyanto. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Prenada Media Group : Jakarta.
- Blau, Peter M. dan Marshall W. Meyer. 1987. *Birokrasi dalam*

- Masyarakat Modern*. Penerbit Universitas Indonesia (UI Press) : Jakarta.
- Brannen, Julia, 2005, *Memadu Metode Penelitian – Kualitatif & Kuantitatif*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Carlsson, S.G., 2002, Dental phobic patients' view of dental anxiety and experiences in dental care: a qualitative study, *Scand J Caring Sci*,
- Devas, Nick dkk 1998. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. UI Press. Jakarta.
- Howlett dan Ramesh, 1995, *Studying Public Policy : Policy Olice an Policy Subsystem*, Oxford University Press, Oxford
- Kettl, Donald F., and John J. DiIulio, Jr, 1995, *Inside the Reinvention Machineu Appraising Governmental Reform*, The Brookings Institution.
- Mardiasmo, 2002, "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah". Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Riant Nugroho, 2011, *Public Policy, Edisi Ketiga (Revisi)*, Gramedia : Jakarta
- Widodo, J., 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Bayumedia Publishing : Malang.
- Widodo, Joko 2001, *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia : Surabaya.
- Sumber-sumber lain :**
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Perda Kabupaten Karimun Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pertamanan dan Kebersihan.
- Kurniawan Agung, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik, Pembaruan*, Yogyakarta.
- Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan*, Alumni, Bandung.
- Fajar Mukti & Achmad Yulianto, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harsono Hanifah, 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Rinheka Karsa, Yogyakarta.
- Juniarso Ridwan, 2008, *Hukum Tata Ruang*, Nuansa, Bandung.
- Kaloh J, 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Markuz Zahnd, 2006, *Perancangan Kota Secara Terpadu*, Kanisius, Yogyakarta.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Karimun, 2009-2014, Karimun.

Setiawan Guntur, 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Cipta Karya, Jakarta.

Solichin Abdul, 2002, *Analisis Kebijakan ; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Sunarno Siswanto, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Usman Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaa.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009 tentang

Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah

Kota/Kawasan Perkotaan.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota